

Adaptasi Production Force Management pada Pengelolaan Lahan Tua Kelapa Sawit dalam Perspektif Administrasi Publik di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 Kabupaten Sintang

Fadillah Maharani Putri

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: putrifadillahmaharani@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of Production Force Management in the management of mature oil palm plantations at PT Sinar Dinamika Kapuas 4, Lebak Ubah Village, Sintang Regency, West Kalimantan. The decline in the productivity of mature oil palm plantations to 12 to 15 metric tons of fresh fruit bunches (FFB) per hectare per year is not merely a technical issue for the company but a public concern, as it has implications for national food and energy security, compliance with ISPO and RSPO regulations, and the dynamics of the relationship between the state, the private sector, and the community in the plantation area. This study aims to describe the productivity conditions of mature plantations, analyze PFM adaptation through four New Public Management indicators, examine the role of the administrative system as both a supporter and an obstacle, and identify constraints and strategic solutions. The study employed a qualitative method with a descriptive approach, using purposive sampling of eleven informants, data collection through in-depth interviews, field observations, and document analysis, as well as data analysis using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model, whose validity was tested through triangulation of sources and methods. The results show that PFM adaptation has been partial and informal at the field level, but is hampered by a three- to six-month budget approval process, the fragmentation of the SawitPro and SAP ERP reporting systems, and the ISPO and RSPO documentation burden, which consumes approximately thirty percent of the administrative team's working time. The fast-track approval innovation successfully reduced the approval process from two to three weeks to two to three days, demonstrating that simple administrative reforms can support PFM adaptation. The study recommends formalizing bottom-up innovations, integrating reporting systems, and strengthening the delegation of operational authority.

Keywords: ISPO, RSPO, Mature Oil Palm Plantations, New Public Management, Production Force Management



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Kelapa sawit menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia sekaligus menjadi salah satu sektor yang paling kompleks dari sisi tata kelola publik. Program mandatori biodiesel memposisikan Indonesia sebagai produsen minyak nabati terbesar dunia yang menopang ketahanan pangan serta energi nasional melalui devisa utama sementara kompleksitas tata kelola kelapa sawit sendiri berakar pada keterjalinan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan perkebunan dan lembaga sertifikasi hingga masyarakat sekitar areal kebun dalam sebuah kerangka administrasi publik yang menuntut negara merumuskan regulasi guna mengawasi kepatuhan serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Pratama et al., 2024; Pasolong, 2022).

Berbagai instrumen kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan skema sertifikasi sukarela Roundtable on Sustainable Palm Oil merepresentasikan kehadiran negara dalam mengatur sektor ini sehingga perusahaan perkebunan swasta diposisikan sebagai aktor pengemban kepentingan publik di luar fungsi komersialnya yang menjadikan setiap dinamika internal terkait kepatuhan regulasi dan hubungan sosial masyarakat sekitar sebagai persoalan publik yang perlu diteliti secara mendalam (Dwiyanto, 2021; Siregar dan Sukiman, 2024).

Pertumbuhan luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang yang mencapai sekitar 422.970 hektare di bawah pengelolaan berbagai perusahaan swasta nasional sejak akhir tahun 1990 an kini memunculkan fenomena krusial berupa meningkatnya jumlah lahan dengan tanaman berumur di atas delapan belas tahun yang mengalami penurunan produksi struktural akibat berkurangnya jumlah tandan buah segar serta meningkatnya batang tanaman dan menurunnya efisiensi penyerapan unsur hara sehingga kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan perusahaan dan kontribusi daerah terhadap produksi minyak sawit nasional serta keberlanjutan penyerapan tenaga kerja lokal (Supriyanto et al., 2022; Mulyawan et al., 2025).

Dimensi publik yang nyata dalam persoalan lahan tua kelapa sawit mencakup implikasi penurunan produktivitas terhadap penerimaan negara melalui pajak dan bea ekspor minyak sawit mentah serta potensi konflik agraria pada blok perbatasan kebun akibat pengelolaan lahan yang tidak optimal sementara kewajiban kepatuhan terhadap standar ISPO dan RSPO mengharuskan pelaporan kegiatan rehabilitasi secara transparan kepada otoritas publik bahkan model pengelolaan lahan tua ini menjadi rujukan nasional bagi program Peremajaan Sawit Rakyat yang melibatkan kemitraan teknis perkebunan swasta sehingga kajian terhadap satu kasus perusahaan berfungsi

sebagai instrumen untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan publik di sektor perkebunan secara luas (Rahmawati et al., 2023; Pratama et al., 2024).

Telaah literatur terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pengelolaan lahan tua kelapa sawit di Indonesia masih didominasi pendekatan agronomis dan manajemen sumber daya manusia. Mulyawan et al. (2025) mengkaji manajemen tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kebun Cikasungka, Banten, dengan fokus pada produktivitas pemanen tanpa membahas dimensi tata kelola administratifnya. Muthmainnah et al. (2024) meneliti strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja pemanen di PT Karangjuang Hijau Lestari 1 menggunakan analisis SWOT yang menitikberatkan pada aspek motivasi dan kompensasi. Pratama et al. (2024) memfokuskan kajian pada karakteristik sosial ekonomi tenaga kerja panen di PT Task Parenggean. Sementara Permasi et al. (2025) meneliti pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan panen di PT Sinar Dinamika Kapuas 1 menggunakan pendekatan kuantitatif. Junaidi dan Maulana (2022) menelaah penerapan New Public Management pada Badan Usaha Milik Negara di sektor perkebunan, namun lebih banyak pada aspek normatif. Keenam penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi belum menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sistem tata kelola administratif perusahaan perkebunan beradaptasi dengan tuntutan manajemen produksi modern dalam kerangka kebijakan publik. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yakni mengintegrasikan pendekatan *Production Force Management* sebagai instrumen manajemen produksi dengan kerangka *New Public Management* sebagai pisau analisis administrasi publik.

Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian menggunakan kerangka *New Public Management* yang dikemukakan oleh Hood (dikutip dalam Pasolong, 2022) sebagai teori utama. *New Public Management* dipilih karena memberikan empat indikator analisis yang relevan untuk menilai sistem administratif yang berorientasi kinerja, yaitu efisiensi yang menekankan pemangkasan prosedur birokratis yang tidak menambah nilai; akuntabilitas yang menuntut pelaporan yang jelas dan dapat ditelusuri kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal; kinerja terukur yang menjadikan indikator kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan; serta responsivitas yang menempatkan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat sebagai orientasi utama. Peneliti memfungsikan keempat indikator tersebut sebagai instrumen analisis utama dalam membedah bagian hasil serta pembahasan sementara *Production Force Management* ditempatkan sebagai bentuk implementasi nyata yang kualitasnya diukur melalui parameter-parameter tersebut guna mewujudkan sintesis yang proporsional antara dimensi tata kelola publik dan praktik manajemen produksi di lapangan sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (2020) serta Latifah dan Najicha (2022).

Kondisi empiris tersebut terepresentasi secara jelas melalui keberadaan PT Sinar Dinamika Kapuas 4 di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang memiliki luasan perkebunan sebesar 3.654 hektar

dengan seluruh tegakan tanaman dari periode tanam 1995 hingga 1997 yang saat ini mengalami degradasi produktivitas hingga menyentuh angka 12 sampai 15 ton TBS per hektar per tahun dari potensi ideal lahan muda yang mencapai 25 hingga 30 ton TBS per hektar per tahun melalui observasi lapangan dan dialog bersama staf asisten kebun serta tinjauan dokumen internal yang mengungkap bahwa fenomena ini dipicu oleh akumulasi faktor biologis berupa serangan jamur *Ganoderma boninense* dan penurunan vitalitas batang faktor agronomis terkait kesuburan tanah dan kerusakan drainase faktor administratif yang melibatkan birokrasi persetujuan yang lamban dan fragmentasi sistem pelaporan hingga faktor sosial yang mencakup perselisihan batas wilayah dengan masyarakat desa sebagaimana dicatat oleh Permasi et al. (2025).

Implikasi dari permasalahan lahan tua ini tidak hanya menysar lingkup internal korporasi namun merambah pada ekosistem masyarakat di sekitar kawasan kebun yang ditandai dengan penurunan daya serap tenaga kerja lokal melalui fluktuasi jumlah pemanen harian sebesar dua puluh lima sampai tiga puluh persen setiap tahun yang pada akhirnya mengancam stabilitas pendapatan buruh tani bersamaan dengan munculnya ketegangan agraria pada blok perbatasan akibat tumpang tindih klaim lahan seluas empat puluh hektar dengan Desa Melayang Sari serta Penjernang Hulu yang belum tuntas sejak 2019 ditambah potensi sengketa batas baru pada 2024 yang membahayakan harmoni sosial perusahaan dengan warga sekitar akibat respons administratif yang kurang memadai seperti tidak teraksessnya tiga blok lahan seluas tujuh puluh lima hektar oleh armada pengangkut karena rusaknya infrastruktur jalan selama musim penghujan serta hambatan teknis pembersihan lahan tanpa membakar pada 2022 yang mengakibatkan hilangnya potensi panen sebesar dua ratus delapan puluh ton tandan buah segar pada area seluas dua ratus hektar yang memberikan penegasan bahwa tata kelola sawit usia tua memiliki korelasi mendalam dengan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan kemitraan strategis perusahaan sebagai pendamping negara di wilayah perkebunan.

Manajemen PT Sinar Dinamika Kapuas 4 berupaya mengatasi kerumitan situasi tersebut melalui penerapan strategi Production Force Management yang menitikberatkan pada pengoptimalan setiap elemen produksi secara terstruktur mulai dari pengaturan rotasi panen dan manajemen nutrisi tanah yang adaptif hingga mitigasi patogen terpadu serta efisiensi sumber daya manusia namun penerapan model ini menghadapi kendala struktural akibat sistem administrasi yang kaku dengan jalur koordinasi anggaran yang memakan waktu tiga hingga enam bulan sekalipun untuk intervensi sederhana serta minimnya sinkronisasi antara platform SawitPro dan SAP ERP yang memicu pemborosan waktu kerja untuk rekonsiliasi data manual ditambah beban kerja dokumentasi sertifikasi ISPO serta RSPO yang menyita tiga puluh persen kapasitas tim administrasi sehingga memunculkan persoalan mendasar mengenai cara menyelaraskan manajemen produksi berbasis data yang menuntut kecepatan gerak dalam bingkai tata kelola birokratis yang masih terfragmentasi demi memenuhi ekspektasi regulasi dan tanggung jawab sosial.

Signifikansi penelitian ini bertumpu pada tiga landasan utama yang diawali dengan masih jaranginya eksplorasi mengenai adaptasi Production Force Management dalam ranah administrasi publik karena mayoritas studi terdahulu cenderung berfokus pada aspek teknis budidaya atau manajemen sumber daya manusia tanpa menyentuh dimensi tata kelola dan kepatuhan regulasi yang melekat pada operasional kebun sebagaimana diidentifikasi oleh Mulyawan et al. (2025) serta Muthmainnah et al. (2024) yang kemudian disusul dengan potensi kontribusi temuan dari PT Sinar Dinamika Kapuas 4 bagi perbaikan sistem administrasi internal perusahaan sejenis dan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah serta nilai strategis model adaptasi ini yang dapat dijadikan acuan bagi keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat pada tingkat nasional.

Rumusan masalah yang diajukan untuk menjawab tantangan tersebut meliputi empat poin utama yang didasarkan pada tinjauan New Public Management dan pengamatan awal yaitu: 1) Bagaimana identifikasi kondisi serta faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas lahan tua kelapa sawit di PT Sinar Dinamika Kapuas 4?; 2) Bagaimana analisis adaptasi Production Force Management melalui lensa empat indikator New Public Management yang mencakup efisiensi dan akuntabilitas serta kinerja terukur dan responsivitas?; 3) Bagaimana peran sistem pengelolaan administratif dalam memposisikan dirinya sebagai pendukung serta penghambat jalannya implementasi Production Force Management pada lahan tua?; 4) Apa saja kendala utama dan solusi strategis bagi adaptasi Production Force Management dalam perspektif administrasi publik yang melatarbelakangi judul penelitian berupa Adaptasi Production Force Management pada Pengelolaan Lahan Tua Kelapa Sawit dalam Perspektif Administrasi Publik di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 Kabupaten Sintang.

Upaya untuk membedah adaptasi Production Force Management pada pengelolaan lahan kelapa sawit usia tua dilakukan melalui penggunaan kerangka teoretis New Public Management yang digagas oleh Hood dengan maksud untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap tata kelola perusahaan yang menjalankan fungsi kemitraan dengan negara sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran mengenai perluasan ruang lingkup New Public Management pada organisasi swasta yang memegang peran publik di sektor sumber daya alam.

Metode

Pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana disarankan oleh Sugiyono tahun 2023 melandasi pengerjaan penelitian ini guna memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam menggali serta menganalisis fenomena adaptasi Production Force Management pada lahan kelapa sawit tua melalui perspektif administrasi publik yang menuntut penelusuran mendalam terhadap praktik tata kelola dan persepsi para aktor lapangan yang selanjutnya dibedah menggunakan kerangka

teori New Public Management versi Hood dalam Pasolong tahun 2022 yang mengedepankan indikator efisiensi serta akuntabilitas serta kinerja terukur serta responsivitas sebagai instrumen analisis utama pada bagian hasil dan pembahasan.

Kegiatan pengumpulan data yang dilangsungkan pada bulan April 2026 ini mengambil lokasi di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 yang terletak di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan integrasi data primer hasil wawancara mendalam serta observasi lapangan dan data sekunder yang terdiri atas laporan produksi internal serta dokumen pelaporan ISPO dan RSPO serta data digital SawitPro serta berbagai literatur akademik yang relevan.

Penentuan narasumber penelitian ini mengandalkan teknik purposive sampling demi menjamin pemilihan informan yang selaras dengan kriteria dan tujuan studi sehingga terkumpul sebelas orang yang mewakili seluruh spektrum jabatan operasional perkebunan dari level manajemen puncak hingga praktisi lapangan sebagaimana rincian yang tersedia pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Kode	Unit
1	Pak Biher	Manager Kebun (Informan Kunci)	MGR-K	Manajemen
2	Pak Hadi Santoso	Kepala Tata Usaha (KTU)	KTU	Administrasi
3	Pak Demas Y.H.	Asisten Kepala (Askep)	ASKEP	Operasional
4	Rupinus Ajion	Staf Asisten Kebun – Divisi I	SAK-I	Divisi I
5	Tri Mulya H.	Staf Asisten Kebun – Divisi II	SAK-II	Divisi II
6	Pujin Kurniawan	Staf Asisten Kebun – Divisi III	SAK-III	Divisi III
7	Eliser	Staf Asisten Kebun – Divisi IV	SAK-IV	Divisi IV
8	Tomivi Itang Sipan	Staf Asisten Kebun – Divisi V	SAK-V	Divisi V
9	Muji Rohmat	Staf Asisten Kebun – Divisi VI	SAK-VI	Divisi VI
10	Ardiansyah	Mandor	MDR-1	Lapangan
11	Bangkit H. Ritonga	Mandor	MDR-2	Lapangan

Sumber: Olahan Data Peneliti 2026

Pak Biher selaku Manager Kebun ditetapkan sebagai informan kunci karena perannya yang sentral dalam pengambilan keputusan strategis sekaligus penghubung dengan kantor pusat. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara, yaitu wawancara mendalam atau in depth interview dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan empat indikator New Public

Management; observasi lapangan secara non partisipatif terhadap kondisi blok kebun, alur kerja administrasi, serta kegiatan operasional harian; dan studi dokumentasi terhadap laporan produksi, dokumen pelaporan ISPO dan RSPO, serta data dashboard SawitPro.

Instrumen penelitian terdiri atas pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan lembar studi dokumentasi yang seluruhnya disusun mengacu pada empat indikator New Public Management. Pemilihan instrumen semi terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi mendalam tanpa kehilangan fokus kerangka teoretis. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (dikutip dalam Sugiyono, 2023) dengan empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data untuk menyeleksi informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur dan tabel, serta penarikan kesimpulan melalui identifikasi pola dan verifikasi temuan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antarinforman pada level jabatan yang berbeda, serta triangulasi metode dengan menyilangkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alasan pemilihan model Miles, Huberman, dan Saldana adalah karena model ini sesuai dengan karakteristik data kualitatif yang dinamis dan memungkinkan peneliti melakukan revisi temuan secara iteratif selama proses penelitian berlangsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyatukan penyajian temuan lapangan dan pembahasannya ke dalam satu alur, mengikuti empat indikator New Public Management menurut Hood (dikutip dalam Pasolong, 2022), yaitu efisiensi, akuntabilitas, kinerja terukur, dan responsivitas. Pada setiap indikator, peneliti memaparkan terlebih dahulu hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, lalu langsung mengaitkannya dengan teori serta penelitian terdahulu. Production Force Management berperan sebagai instrumen implementasi yang dievaluasi melalui keempat indikator tersebut.

Efisiensi Adaptasi Production Force Management

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa indikator efisiensi dalam adaptasi PFM di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 belum terlaksana secara optimal. Sistem persetujuan anggaran yang masih bersifat bertingkat dan memerlukan waktu antara tiga hingga enam bulan bagi intervensi sederhana seperti perbaikan infrastruktur blok serta pengadaan input agronomis rutin telah memosisikan administrasi sebagai bottleneck utama yang menunda respons terhadap dinamika lapangan terutama pada situasi degradasi lahan yang membutuhkan penanganan cepat.

Konfirmasi peninjauan atas pengajuan perbaikan jembatan blok senilai tiga puluh lima juta rupiah baru diperoleh setelah melampaui waktu satu tahun sehingga menyebabkan tiga blok dengan luas total tujuh puluh lima hektar tidak

dapat diakses kendaraan angkut selama musim hujan dan fakta ini diperkuat oleh keterangan Pak Hadi Santoso selaku Kepala Tata Usaha yang menyebutkan bahwa rantai persetujuan yang panjang berdampak langsung pada penurunan kemampuan operasional kebun dalam merespons kerusakan infrastruktur secara cepat.

Dimensi efisiensi memperlihatkan adanya inovasi internal melalui penerapan templat digital fast track approval oleh PT Sinar Dinamika Kapuas 4 sejak tahun 2023 untuk pengeluaran rutin di bawah lima puluh juta rupiah yang disetujui langsung oleh manajer kebun sehingga waktu persetujuan berhasil dipangkas dari hitungan minggu menjadi hanya dua sampai tiga hari saja serta mempercepat sekitar enam puluh persen transaksi rutin dan menghemat biaya administrasi sekitar delapan puluh juta rupiah per tahun walaupun keberhasilan ini masih bergantung pada inisiatif individu level menengah karena belum diformalkan dalam kebijakan internal Perusahaan.

Bottleneck utama bagi adaptasi PFM tercipta akibat rantai persetujuan anggaran yang memakan waktu tiga hingga enam bulan dan kondisi tersebut mencerminkan patologi birokrasi vertikal sebagaimana dikemukakan Pasolong (2022) ketika hirarki yang dirancang demi pengendalian justru berbalik menghambat respons operasional serta selaras dengan penegasan Siregar dan Sukiman (2024) mengenai hambatan struktural dalam rantai persetujuan birokratis yang menjadi pemicu utama lambannya implementasi kebijakan di Indonesia saat menuntut respons cepat terhadap dinamika lapangan.

Keberhasilan fast track approval di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 menguatkan temuan Latifah dan Najicha (2022) yang menempatkan simplifikasi prosedur serta delegasi kewenangan sebagai instrumen utama reformasi administratif berbasis New Public Management dan hal ini sebanding dengan catatan Ditasman dan Amrullah (2024) mengenai digitalisasi prosedur administratif yang mampu memangkas waktu pelayanan publik hingga lebih dari lima puluh persen serta argumen Andry dan Sawir (2024) yang menunjukkan bahwa budaya pelayanan berbasis teknologi dapat meredam resistensi birokrasi konvensional melalui komitmen pimpinan yang kuat dan dilengkapi oleh catatan Sangaji dan Irianto (2025) bahwa transformasi pelayanan digital baru akan berdampak signifikan apabila perusahaan turut mendelegasikan kewenangan secara terukur kepada level operasional

Junaidi dan Maulana (2022) menegaskan hal serupa melalui kajian mereka tentang penerapan New Public Management pada BUMN sektor perkebunan; keduanya menemukan bahwa simplifikasi rantai persetujuan sanggup mengangkat kinerja operasional hingga empat puluh persen tanpa mengorbankan pengendalian internal. Sintia dan Sariningsih (2022) menjumpai pola yang sejalan pada reformasi birokrasi sektor publik, ketika pelimpahan kewenangan secara terukur kepada manajer tingkat menengah berkorelasi positif dengan kecepatan organisasi merespons kebutuhan lapangan. Osborne dan Gaebler (2020) menamai situasi ini sebagai prinsip dasar reinventing

government, yakni memindahkan kewenangan keputusan kepada level yang paling dekat dengan persoalan nyata.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dalam NPM tidak boleh berhenti sebagai wacana; ia menuntut perubahan struktur kewenangan yang konkret. Pada tataran praktis, PT Sinar Dinamika Kapuas 4 perlu memformalkan inovasi fast track approval ke dalam kebijakan internal supaya keberhasilannya tidak lagi bergantung pada inisiatif personal yang mudah goyah ketika posisi manajerial berganti. Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa indikator efisiensi dalam adaptasi PFM baru berjalan sebagian dan masih memerlukan dukungan formalisasi kelembagaan agar dapat bertahan.

Akuntabilitas dalam Pelaporan dan Kepatuhan Regulasi

Indikator akuntabilitas dalam adaptasi PFM di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 menunjukkan situasi yang ambivalen. Perusahaan telah mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi publik melalui sertifikasi ISPO sebagai instrumen kebijakan negara serta RSPO selaku standar pasar internasional meskipun kewajiban dokumentasi tersebut menyerap sekitar tiga puluh persen waktu kerja tim administrasi akibat format pelaporan yang tidak kompatibel sehingga memaksa perusahaan menyiapkan dokumen secara terpisah untuk masing-masing skema.

Fragmentasi sistem pelaporan internal yang memisahkan pengelolaan data produksi pada sistem SawitPro dan data keuangan pada SAP ERP menyebabkan beban akuntabilitas semakin berat karena tim administrasi harus melakukan rekonsiliasi data secara manual selama tiga hingga lima hari kerja setiap bulan demi memastikan kesesuaian angka sementara budaya kerja yang terpaku pada prosedur operasional standar terus memperlambat transformasi akuntabilitas menjadi instrumen pengambilan keputusan berbasis data yang signifikan.

Implementasi kebijakan zero burning sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 mengharuskan pembersihan lahan secara manual yang memerlukan durasi dua hingga tiga kali lebih lama serta tambahan biaya sebesar lima puluh juta rupiah untuk setiap blok lima puluh hektar yang pada akhirnya memicu penundaan panen di lahan seluas dua ratus hektar dengan total kehilangan sekitar dua ratus delapan puluh ton tandan buah segar selama musim kemarau 2022 berlangsung.

Beban dokumentasi ISPO dan RSPO yang menyita tiga puluh persen waktu kerja tim administrasi mencerminkan apa yang Dwiyanto (2021) namakan paradoks akuntabilitas, yaitu keadaan ketika tuntutan akuntabilitas yang berlebihan justru menggerogoti kapasitas organisasi untuk menjalankan misi utamanya. Rahmawati et al. (2023) menemukan bahwa dokumentasi sertifikasi keberlanjutan di perkebunan kelapa sawit Indonesia rata-rata melahap lebih dari seperempat waktu kerja staf administrasi, padahal kontribusinya terhadap kualitas keputusan manajerial nyaris tidak terasa. Apa yang mereka temukan persis menggambarkan kondisi di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 dan menegaskan

bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan sekadar kekhasan satu perusahaan.

Fragmentasi sistem pelaporan internal antara SawitPro dan SAP ERP, yang memaksa tim administrasi melakukan rekonsiliasi manual tiga sampai lima hari setiap bulan, ternyata bukan persoalan yang berdiri sendiri. Anggriyani dan Dewi (2025) menggarisbawahi bahwa akuntabilitas formal tanpa integrasi sistem digital cenderung melahirkan duplikasi kerja dan inefisiensi yang besar. Muttaqin dan Sriyono (2021) menambahkan bahwa akuntabilitas berkualitas pada era digital menuntut sistem pelaporan yang terintegrasi lintas instansi dan lintas standar, sehingga apa yang dialami PT Sinar Dinamika Kapuas 4 sesungguhnya mencerminkan persoalan struktural yang banyak dijumpai organisasi lain.

Penerapan kebijakan zero burning yang membuat perusahaan kehilangan dua ratus delapan puluh ton tandan buah segar pada musim kemarau 2022 memperlihatkan sisi lain dari regulasi publik: aturan yang secara prinsip tepat pun dapat memukul operasional bila pemerintah tidak menyiapkan instrumen pendukung. Temuan Fadlan et al. (2020) memperkuat pengamatan ini, sebab mereka menilai efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada tersedianya kompensasi atau insentif bagi pihak yang menanggung biaya pelaksanaan. Junaidi dan Maulana (2022) menegaskan pula bahwa kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan di sektor perkebunan idealnya berjalan beriringan dengan dukungan teknis dan finansial bagi pelaku usaha, khususnya untuk teknologi alternatif seperti pembersihan lahan mekanis bersubsidi.

Rizqi et al. (2023) melangkah lebih jauh dengan menyoroti bahwa akuntabilitas dalam tata kelola kontemporer mestinya berarti relasi dua arah antara organisasi dan publik, bukan sekadar memenuhi format pelaporan administratif. Prawira et al. (2022) menambahkan bahwa pelaporan yang efektif harus mampu menyampaikan mutu keputusan secara substantif, bukan menumpuk dokumen dalam jumlah besar. Secara teoretis, temuan ini menempatkan akuntabilitas bukan sebagai kewajiban formal belaka, melainkan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang menopang pencapaian misi organisasi. Pada sisi praktis, PT Sinar Dinamika Kapuas 4 perlu mengadvokasi otoritas perkebunan agar mengembangkan template pelaporan terintegrasi yang sekaligus mengakomodasi persyaratan ISPO dan RSPO.

Kinerja Terukur dalam Empat Komponen Implementasi PFM

Indikator kinerja terukur memperlihatkan capaian paling positif dalam adaptasi PFM di PT Sinar Dinamika Kapuas 4. Hasil penelitian mengidentifikasi empat komponen PFM yang berhasil dijalankan dengan basis data kuantitatif, yaitu diferensiasi blok berbasis indeks produktivitas, sistem rayon pemanen, deteksi dini Ganoderma berbasis survei visual mingguan, serta rehabilitasi bertahap berbasis analisis tanah. Ringkasan capaian keempat komponen tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Komponen PFM Berbasis Indikator Kinerja Terukur

No.	Komponen PFM	Lokasi Pelaksana	Indikator Capaian	Hasil Kuantitatif
1	Diferensiasi blok berbasis indeks produktivitas	Divisi I–VI	Laju penurunan produksi tahunan	Turun dari 12–15% menjadi 8% per tahun
2	Sistem rayon pemanen	Divisi II	Angka kehilangan berondolan	Turun dari 3,2% menjadi 1,8%
3	Sistem rayon termodifikasi (regu kecil)	Divisi III	Tingkat absensi pemanen	Turun dari 18% menjadi 11%
4	Deteksi dini Ganoderma berbasis survei mingguan	Divisi IV	Waktu deteksi gejala awal	Lebih awal 4–6 minggu
5	Rehabilitasi berbasis analisis tanah	Divisi V	Peningkatan produktivitas blok	Naik 8% dari 9 menjadi 9,7 ton/ha

Sumber: Olahan Data Peneliti 2026

Pada komponen diferensiasi blok, implementasi program rotasi blok prioritas berbasis indeks kesehatan tanaman yang dijalankan sejak 2022 berhasil menahan laju penurunan produksi pada angka delapan persen per tahun, dibanding tren historis sebelumnya yang mencapai dua belas hingga lima belas persen per tahun tanpa intervensi terpadu. Alokasi sekitar tujuh puluh persen anggaran perawatan diarahkan oleh strategi manajemen sumber daya menuju blok produktif yang mencatatkan capaian produktivitas antara dua belas hingga delapan belas ton per hektar serta menetapkan lahan dengan hasil di bawah delapan ton per hektar sebagai prioritas utama dalam agenda peremajaan.

Mandat tanggung jawab penuh diberikan kepada setiap pemanen atas blok spesifik melalui pelaksanaan sistem rayon di lingkungan Divisi II semenjak tahun 2023 sehingga kehilangan berondolan yang semula berada pada angka tiga koma dua persen tereduksi menjadi satu koma delapan persen sekaligus meningkatkan akurasi estimasi hasil panen secara signifikan dan Divisi III mengadopsi prinsip serupa dengan modifikasi berupa pembentukan regu kecil beranggotakan lima serta enam orang yang diberikan target harian tertentu agar tingkat absensi yang sebelumnya mencapai delapan belas persen dapat ditekan hingga menyentuh sebelas persen dalam durasi satu tahun.

Komponen deteksi dini Ganoderma yang dikembangkan di Divisi IV berbasis survei visual mandor mingguan terbukti mampu mendeteksi gejala awal infeksi empat hingga enam minggu lebih awal dibanding survei bulanan standar. Keuntungan ekonomis dari deteksi dini ini sangat signifikan karena stadium awal infeksi masih dapat diintervensi dengan biaya dua sampai tiga juta rupiah per pokok, jauh lebih hemat dibanding stadium lanjut yang sudah tidak dapat diselamatkan. Adapun komponen rehabilitasi berbasis analisis tanah yang dijalankan di Divisi V sejak 2023 melalui pemupukan berimbang dua kali

setahun dan program zero weeding di sekitar pokok mampu meningkatkan produktivitas sebesar delapan persen dari baseline sembilan ton menjadi 9,7 ton per hektar dalam satu tahun.

Keberhasilan empat komponen PFM di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 memperlihatkan bahwa level operasional telah mengadopsi prinsip kinerja terukur New Public Management secara substantif. Pratama et al. (2024) memperkuat temuan ini ketika menegaskan bahwa pengukuran kinerja melalui indikator yang relevan dengan kondisi lapangan menjadi kunci peningkatan produktivitas perkebunan yang berkelanjutan. Mulyawan et al. (2025) menjumpai gejala serupa dalam kajiannya tentang manajemen tenaga kerja di Kebun Cikasungka; di sana indikator kinerja kuantitatif yang spesifik mampu mengangkat disiplin operasional sekaligus akurasi perencanaan panen hingga lebih dari dua puluh persen.

Sistem rayon pemanen di Divisi II yang menekan kehilangan berondolan dari 3,2 menjadi 1,8 persen sejalan dengan Muthmainnah et al. (2024); mereka menegaskan bahwa mengelola tenaga kerja panen berdasarkan tanggung jawab teritorial merupakan strategi yang ampuh untuk mendongkrak produktivitas perkebunan kelapa sawit. Permasi et al. (2025) turut menemukan korelasi positif antara kejelasan tanggung jawab teritorial dan disiplin operasional pemanen di PT Sinar Dinamika Kapuas 1 Melawi, perusahaan yang sejenis. Sementara itu, modifikasi regu kecil di Divisi III yang memangkas absensi dari delapan belas menjadi sebelas persen memperkuat argumen Siagian (2023) bahwa kepemimpinan pada level mikro berperan besar dalam merekatkan kohesi tim kerja.

Komponen deteksi dini Ganoderma yang mengandalkan survei visual mingguan mendatangkan keuntungan ekonomis yang nyata karena membuka peluang intervensi sejak stadium awal infeksi. Pola kerja semacam ini mewujudkan prinsip *evidence based management* yang oleh Osborne dan Gaebler (2020) ditempatkan sebagai jantung New Public Management. Rahmawati et al. (2023) menemukan bahwa investasi pada sistem deteksi dini hama dan penyakit memiliki rasio biaya manfaat yang sangat tinggi di perkebunan kelapa sawit yang memasuki fase tua. Adapun komponen rehabilitasi berbasis analisis tanah di Divisi V yang menaikkan produktivitas delapan persen dalam setahun memperkuat temuan Supriyanto et al. (2022) mengenai pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengelolaan rantai pasok kelapa sawit.

Kendati demikian, perusahaan belum sepenuhnya menuangkan capaian-capaian ini ke dalam Standar Operasional Prosedur resmi, sehingga sifatnya masih parsial. Junaidi dan Maulana (2022) menjumpai pola yang sama di banyak BUMN perkebunan, ketika inovasi *bottom up* yang sebenarnya berhasil justru jarang terdokumentasi secara sistematis sehingga unit lain kesulitan menirunya. Sintia dan Sariningsih (2022) menegaskan bahwa formalisasi praktik baik menjadi prasyarat agar reformasi administratif dapat bertahan. Dari sudut teori, temuan ini memperlihatkan bahwa kinerja terukur dalam NPM tidak berhenti pada keberadaan indikator kuantitatif; ia juga menuntut kelembagaan yang

menjamin keberlanjutan dan penyebaran praktik terbaik ke seluruh unit organisasi.

Responsivitas terhadap Dinamika Lapangan dan Komunitas

Indikator responsivitas dalam adaptasi PFM di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 menunjukkan kesenjangan yang nyata antara responsivitas Kapasitas respons operasional yang mumpuni telah diperlihatkan oleh mandor serta staf asisten divisi pada tingkat lapangan meskipun dinamika tersebut belum diimbangi oleh sistem manajemen korporat yang memadai karena keputusan krusial masih terhambat oleh instruksi berlapis dari manajemen puncak yang mengakibatkan keterlambatan penanganan kondisi cuaca ekstrem selama berjam-jam serta memicu kerugian operasional yang signifikan.

Keterbatasan responsivitas terhadap pelaksana PFM terlihat dari rendahnya kemahiran literasi digital mandor dalam mengoperasikan aplikasi SawitPro serta tingginya angka perputaran tenaga kerja yang menghambat keberlanjutan investasi pelatihan ditambah lagi dengan adanya kebijakan restriksi akses dashboard produktivitas yang hanya berpusat pada level manajerial sehingga staf ujung tombak kehilangan basis data esensial bagi pengambilan keputusan lapangan.

Pola serupa ditemukan pada aspek hubungan komunitas di mana pendekatan informal mandor melalui interaksi sosial rutin serta komunikasi terbuka terbukti mampu meredam mayoritas sengketa lahan di perbatasan wilayah desa tanpa harus menempuh jalur formal perusahaan yang seringkali lamban dalam menyelesaikan klaim hukum yang telah menggantung sejak lama di mana keberhasilan organik ini justru luput dari sistem pelaporan resmi korporasi karena ketiadaan format standar yang mampu mengakomodasi data kualitatif serta dinamika sosiologis di lapangan.

Ketimpangan antara efektivitas lapangan dengan kelemahan sistem korporat dalam mengelola sengketa batas lahan tersebut selaras dengan pemikiran Pasolong (2022) mengenai urgensi pengintegrasian hubungan sosial ke dalam manajemen operasional yang kemudian diperkuat oleh Fadlan et al (2020) melalui gagasan bahwa responsivitas administrasi publik mewajibkan organisasi untuk segera menyerap serta memadukan aspirasi masyarakat ke dalam mekanisme pengambilan keputusan yang formal.

Kerentanan praktik pencegahan konflik agraria terhadap rotasi personel di PT Sinar Dinamika Kapuas 4 dijelaskan oleh Rizqi et al (2023) melalui fenomena hilangnya pengaruh mekanisme partisipatif yang tidak terlembagakan sementara Prawira et al (2022) mengidentifikasi bahwa absennya kerangka pelaporan ramah data kualitatif menyebabkan banyak keberhasilan responsivitas luput dari catatan resmi perusahaan yang menurut Muttaqin dan Sriyono (2021) seharusnya diatasi dengan melakukan pelebagaan pengetahuan lokal melalui format pelaporan yang presisi.

Monopoli informasi oleh level manajemen atas yang memicu fenomena asymmetric information sebagaimana dikemukakan Anggriyani dan Dewi (2025)

telah menghambat aliran data menuju staf divisi yang sangat membutuhkannya padahal Junaidi dan Maulana (2022) telah menegaskan bahwa demokratisasi akses data merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kinerja terukur dalam kerangka New Public Management serta Siagian (2023) menambahkan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi yang relevan dengan tanggung jawab mereka.

Hambatan transformasi berbasis teknologi pada organisasi publik dan swasta di Indonesia berakar pada kesenjangan literasi digital yang masif sebagaimana disoroti oleh Ditasman dan Amrullah (2024) sehingga investasi pelatihan berjenjang menjadi langkah krusial untuk menjamin keberhasilan administratif menurut Andry dan Sawir (2024) yang secara teoretis membuktikan bahwa responsivitas dalam paradigma New Public Management memerlukan kerangka kelembagaan yang mampu mengasimilasi pengetahuan lokal serta praktik informal ke dalam sistem manajemen formal organisasi.

Sintesis: Adaptasi PFM dalam Kerangka NPM dan Kontribusi Konseptual

Analisis terpadu terhadap keempat indikator NPM menyingkap pola asimetris dalam adaptasi PFM pada PT Sinar Dinamika Kapuas 4 yang mana kinerja terukur mendominasi sebagai capaian paling signifikan berkat keselarasan alaminya dengan logika operasional perkebunan yang mengedepankan data kuantitatif sementara hambatan struktural pada level kelembagaan menghalangi optimalisasi efisiensi serta responsivitas di tengah kerumitan dokumentasi yang belum terharmonisasi sehingga mengakibatkan akuntabilitas terjebak dalam kompleksitas administratif.

Pola tersebut memvalidasi argumen Hood yang dikutip dalam Pasolong (2022) mengenai keterpautan serta kekuatan yang saling mengunci di antara keempat indikator NPM karena keterbatasan pada satu dimensi akan menghambat kemajuan indikator lainnya secara sistemik sebagaimana terlihat pada lambannya persetujuan anggaran yang mengekang responsivitas lapangan serta akuntabilitas terfragmentasi yang membatasi pemanfaatan kinerja terukur sebagai alat pengambilan keputusan strategis yang mana Sintia serta Sariningsih (2022) juga menegaskan bahwa kegagalan transformasi tata kelola yang bermakna sering kali bersumber dari reformasi administratif setengah-setengah yang tidak ditopang pendekatan terintegrasi terhadap seluruh dimensi organisasi.

Penelitian ini menyumbangkan kontribusi konseptual mengenai posisi perusahaan swasta sebagai pelaksana kebijakan publik mengingat status PT Sinar Dinamika Kapuas 4 sebagai pemegang sertifikasi ISPO serta RSPO sekaligus mitra negara dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan telah melekatkan fungsi publik ke dalam operasional bisnisnya sehingga penerapan prinsip NPM pada korporasi yang memikul misi publik menjadi sangat relevan sebagaimana ditegaskan oleh Sangaji serta Irianto (2025) melalui pemikiran mengenai perluasan ruang lingkup NPM ke entitas nonpemerintah dalam kerangka tata kelola kontemporer yang didukung pula oleh pandangan Junaidi

serta Maulana (2022) bahwa era tata kelola hibrida telah mengaburkan batas antara aktor publik serta swasta sehingga diperlukan penyesuaian pendekatan NPM guna merangkul keragaman aktor yang menjalankan fungsi publik secara optimal.

Kesimpulan

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Production Force Management dalam tata kelola lahan tua kelapa sawit pada PT Sinar Dinamika Kapuas 4 memang telah berlangsung namun efektivitasnya belum mencapai titik optimal apabila ditinjau melalui empat indikator New Public Management gagasan Hood karena hambatan dalam indikator efisiensi masih bersumber dari mekanisme persetujuan anggaran yang berjenjang serta memerlukan durasi hingga enam bulan sehingga kehadiran inovasi fast track approval yang mampu mereduksi waktu tunggu hingga menjadi dua sampai tiga hari saja menjadi bukti nyata betapa signifikannya potensi peningkatan efisiensi seandainya perusahaan memberikan ruang lebih luas bagi simplifikasi prosedur serta pendelegasian kewenangan.

Indikator akuntabilitas menunjukkan bahwa kewajiban terhadap pemenuhan standar ISPO serta RSPO sebagai instrumen kebijakan publik telah terlaksana dengan baik walaupun beban dokumentatif yang menghabiskan sepertiga waktu kerja staf administrasi ditambah adanya keterpisahan antara sistem SawitPro dan SAP ERP mengonfirmasi bahwa akuntabilitas formal tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi alat manajemen yang berdaya guna secara operasional sementara itu prinsip kinerja terukur telah meresap secara substantif ke dalam operasional PFM melalui integrasi diferensiasi blok berdasarkan indeks produktivitas dan sistem rayon pemanen serta pemantauan dini Ganoderma melalui survei rutin mingguan hingga rehabilitasi lahan bertahap yang berlandaskan pada hasil analisis tanah secara komprehensif. Berbagai capaian kuantitatif seperti perlambatan laju penurunan produksi dari kisaran lima belas persen menjadi delapan persen saja tiap tahunnya serta penghematan kehilangan berondolan dari angka tiga koma dua persen menjadi satu koma delapan persen menegaskan bahwa budaya kinerja terukur telah tertanam kuat pada tataran teknis lapangan kendati formalisasi dalam sistem internal korporasi masih memiliki keterbatasan tertentu.

Indikator responsivitas memperlihatkan adanya diskrepansi yang cukup tajam antara efektivitas penanganan informal di level mandor yang sukses meredam mayoritas sengketa batas lahan dengan kelemahan responsivitas formal pada level birokrasi korporat sehingga urgensi pelebagaan praktik responsif ke dalam kerangka administratif resmi perusahaan menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi dan penelitian ini pada akhirnya merumuskan bahwa keberhasilan transformasi PFM di area perkebunan tua memerlukan sinergi antara reformasi administratif yang bersifat paralel serta formalisasi berbagai inovasi yang muncul dari bawah sekaligus penguatan delegasi kewenangan

operasional dalam skema tata kelola yang senantiasa berorientasi pada pencapaian misi publik secara berkelanjutan.

Penelitian ini merumuskan empat rekomendasi strategis yang menuntut PT Sinar Dinamika Kapuas 4 untuk menginstitusionalisasikan sistem e-Approval terintegrasi dengan kepastian batas waktu respons serta pendelegasian otoritas pengeluaran rutin di bawah lima puluh juta rupiah bagi level manajer kebun sebagai manifestasi nyata inovasi persetujuan cepat yang telah teruji dan kementerian pertanian melalui dinas perkebunan provinsi diharapkan memfasilitasi pembuatan templat pelaporan tunggal yang mengakomodasi standar ISPO serta RSPO secara simultan agar beban dokumentasi kepatuhan dapat dipangkas tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas publik.

Internalisasi empat komponen model adaptasi PFM ke dalam Standar Operasional Prosedur resmi yang dibarengi dengan edukasi literasi digital secara bertahap bagi para mandor menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan perancangan sistem pelaporan sosial serta kondisi lapangan yang tertata harus dilakukan agar hubungan dengan komunitas dapat terekam secara sistematis sebagai bagian dari tanggung jawab korporat sekaligus menjadi alat pencegahan konflik agraria yang memengaruhi status kepatuhan ISPO serta RSPO serta penelitian masa depan yang menggunakan pendekatan longitudinal sangat disarankan untuk menelaah pengaruh berkelanjutan dari reformasi birokrasi ini terhadap produktivitas dan ketahanan operasional lahan tua kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat.

Daftar Pustaka

- Andry, A., & Sawir, M. (2024). Membangun budaya pelayanan publik yang ramah: Implementasi teknologi digital dalam birokrasi pemerintahan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 216–228.
- Anggriyani, N. M., & Dewi, I. G. A. A. Y. (2025). Efektivitas aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 82–92.
- Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Kajian literatur: Reformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525–533.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM Press.
- Fadlan, M., Khaidir, A., & Putri, N. E. (2020). Partisipasi media sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik Pemerintah Kota Padang. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 49–57.

-
- Junaidi, A., & Maulana, R. (2022). Penerapan prinsip New Public Management pada Badan Usaha Milik Negara sektor perkebunan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 4(2), 112–128.
- Latifah, K. N., & Najicha, F. U. (2022). Implikasi media sosial terhadap formulasi kebijakan publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 494–501.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, Z., Junaedi, A., & Supijatno, S. (2025). Manajemen tenaga kerja perkebunan kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Kebun Cikasungka, Banten. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 53(1), 88–99.
- Muthmainnah, S. D., Jumiaty, E., & Mubarak, A. (2024). Analisis strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja pemanen kelapa sawit di PT Karangjuang Hijau Lestari 1. *Mimbar Agribisnis*, 10(1), 1228–1234.
- Muttaqin, M. Z., & Sriyono. (2021). Konstruksi opini publik melalui media sosial: Studi pendekatan analisis wacana kritis grup Facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2, 113–129.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2020). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Plume Books.
- Pasolong, H. (2022). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Permasi, D., Kurniati, D., & Suharyani, A. (2025). Pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan panen PT Sinar Dinamika Kapuas 1 Kabupaten Melawi. *Mimbar Agribisnis*, 11(2), 3186–3192.
- Pratama, G. D., Fajarningsih, R. U., & Marwanti, S. (2024). Karakteristik sosial-ekonomi dan produktivitas tenaga kerja panen kelapa sawit PT Task Parenggean. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(1), 45–58.
- Prawira, M. R., Ardiputra, S., Hidayat, A. R., Artanti, A., & Dewi, N. (2022). Analisis dampak wacana publik di media massa dan media sosial terhadap kebijakan publik. *MANDAR: Social Science Journal*, 1(2), 74–85.
- Rahmawati, D., Setiawan, B., & Hidayah, R. (2023). Implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(3), 412–423.
- Rizqi, M. D., Saputra, W. A., & Murahman, M. (2023). Menggali hubungan antara media sosial dan kebijakan pemerintah: Pendekatan bibliometrik dan tinjauan
-

pustaka. *Jurnal KAWISTARA: The Journal of Social Sciences and Humanities*, 13(3), 389–401.

Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 6(3), 654–667.

Siagian, S. (2023). *Manajemen sumber daya manusia*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.

Sintia, R., & Sariningsih, S. (2022). Reformasi birokrasi dalam perspektif New Public Management di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–162.

Siregar, M., & Sukiman. (2024). Analysis of factors that influence public policy. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 1(6), 50–55.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriyanto, S., Ruliyansyah, A., Pramulya, M., Arifin, N., & Sulistyowati, H. (2022). Kesenjangan rantai pasok kelapa sawit di lanskap Ketungau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. *Perkebunan dan Lahan Tropika*, 11(1), 26–36.